



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**



SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Marolop Hutahaean

NIM. 9407100069

Asal	: Hadiah	Klasifikasi
Terima Tanggal	: 05 AUG 2000	
No. Induk	: 10.2.431	S 342 HUT t e.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

Oleh :

MAROLOP HUTAHAEAN

NIM. 9407100069

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

Oleh :

MAROLOP HUTAHAEAN

NIM. 9407100069

Pembimbing :

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing :

ASMARA BUDI DYAH DS, S.H.

NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000

MOTTO :

*Harta benda yang diperoleh dengan
kefasikan tidak berguna,
tetapi kebenaran menyelamatkan
orang dari maut*

(Amsal 10 : 2)

(Alkitab dengan Kidung Jemaat, Lembaga Alkitab Indonesia, 1994, Jakarta)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yang tercinta Ayahanda H. Hutahaean dan Ibunda R Sianipar yang selama ini telah bekerja keras dan mendoakan demi kesuksesan dan kebahagiaan ;
2. Almamater yang kubanggakan.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 17
Bulan : Juni
Tahun : 2000

PANITIA PENGUJI

KETUA



Hj. Sulaksni, S.H.

NIP. 130 516 490

SEKRETARIS

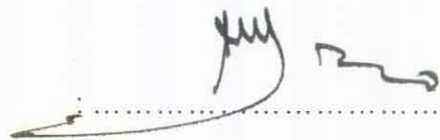


Totok Sudaryanto, S.H., MS.

NIP. 131 120 332

ANGGOTA PENGUJI :

1. Samsi Kusairi, S.H.



2. Asmara Budi Dyah. DS, S.H.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998
TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN
BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

Oleh :

MAROLOP HUTAHAEAN

NIM. 9407100069

PEMBIMBING



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP 130 261 653

PEMBANTU PEMBIMBING



ASMARA BUDI DYAH DS, S.H.

NIP. 130 808 987

Mensahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenannya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAP MPR NOMOR XI/MPR/1998 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME” guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember tempat penulis dididik dan menuntut ilmu khususnya ilmu hukum.

Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas semua bantuan dan dorongan, kepada :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini ;
2. Ibu Asmara Budi Dyah DS, S.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran pada penulis ;
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Ketua Tim Penguji ;
4. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., MS. selaku Sekretaris Tim Penguji ;
5. Bapak I wayan Yasa, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan nasihat pada penulis selama perwalian ;
6. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Yang tersayang adik-adikku Libert Hutahaean dan Nikodemus Hutahaean;
10. Yang tersayang kakak-kakakku Mardiana Hutahaean dan Lintje Hutahaean;
11. Rekan-rekan GMKI Cabang Jember ;
12. Rekan-rekan UKM Olah Raga Universitas Jember ;
13. Rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB “Getsemani” Jember ;
14. UKM Kerohanian Sub Unit Kristen Universitas Jember ;
15. Teman-teman di FKPI ;
16. Para staf LPMI Jember yang senantiasa setia mendoakan penulis ;

17. Rekan-rekan PMK Hukum ;

18. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Fakultas Hukum.

Semoga Tuhan memberkati dan melimpahkan rahmat serta kebijaksanaan pada kita.

Akhir kata penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Indonesia.

Jember, Mei 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Metodologi	2
1.4.1 Pendekatan masalah	2
1.4.1 Metode pengumpulan data	3
1.4.2 Sumber data	3
1.4.3 Analisa data	3
BAB II	
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	4
2.1 Fakta	4
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Penyelenggara Negara	9
2.3.2 Pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme	10
2.3.3 Korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia	12
2.3.4 Sebab-sebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme	15
2.3.5 Akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme	15

BAB III	PEMBAHASAN	17
	3.1 Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	17
	3.1.1 Strategi Preventif	17
	3.1.2 Strategi Represif	25
	3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberantasan Ko- rupsi, Kolusi, dan Nepotisme	28
	3.2.1 Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme	28
	3.2.2 Faktor-faktor yang menghambat dilakukannya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme	31
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	32
	4.1 Kesimpulan	32
	4.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

RINGKASAN

Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Kondisi inilah yang menyebabkan krisis yang melanda negara ini sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini tidak kunjung teratasi. Oleh karena itu, melalui gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa mengangkat korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai isu sentral. Keinginan masyarakat luas agar pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dilaksanakan secara serius dan tidak pandang bulu semakin gencar tiap harinya.

Terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan komitmen politik dari lembaga tertinggi negara. Hadirnya TAP MPR ini membawa nuansa baru bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan terbitnya TAP MPR ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dimana pasca terbitnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 ini, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan baru dalam rangka menindaklanjuti TAP MPR tersebut. Pemerintah dalam hal ini mulai menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Upaya-upaya pemberantasan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebagaimana diamanatkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 ternyata masih menyimpan banyak kendala. Keinginan seluruh komponen bangsa baik penyelenggara negara maupun masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tidak dibarengi dengan penciptaan kondisi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara Negara dan masyarakat justru menciptakan hambatan-hambatan terhadap pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pasca terbitnya TAP MPR Nomor

XI/MPR/1998, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mana metode yang digunakan bersifat yuridis normatif dalam pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengumpulan data melalui studi literatur dengan mempelajari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi, dan Nepotisme, buku-buku, undang-undang dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang kemudian data-data ini dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan karya penulisan bersifat deskriptif analisis.

Penyelenggara Negara dalam era reformasi ini harus membersihkan dirinya dari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini masih mewarnai prilaku mereka, karena sebagai pemimpin bangsa mereka dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat segera terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, **Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional**, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1987, **Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Amir Muhsin, 1987, **Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara**, Bina Aksara, Jakarta
- Juniadi Soewartojo, 1997, **Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya**, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Amien Rais, 1994, **Hak Asasi Manusia Demokratisasi dan Suksesi di Indonesia**, Universitas Brawijaya, Malang
- Philipus M. Hadjon, 1994, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia, Jakarta
- Kliping Surat Kabar
-----, 1998, **Ketetapan-ketetapan MPR Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998**, Pabelan, Surakarta
- , 1999, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, kolusi dan Nepotisme**, Harvarindo, Jakarta
- , 2000, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Havarindo, Jakarta
- , 2000, **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**, Havarindo, Jakarta

- , 1999, **Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara,**
LKBN Antara, Jakarta
- , 1999, **Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara,** LKBN Antara, Jakarta
- , 2000, **Surat Edaran Direktorat Jendral Anggaran Departemen
Keuangan No. SE-32/A/2000,** Departemen Keuangan, Jakarta